

STRATEGI BELA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Eka¹, Kurniati², Zaitun Faujiah³, Nurhasanah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: eka07@asma.belajar.id

Article History

Received: 03-06-2024

Revision: 11-06-2024

Accepted: 14-06-2024

Published: 16-06-2024

Abstract. Pancasila is often seen as an ideology that deals with global ideologies, such as capitalism and liberalism. The Pancasila that was built is for common welfare and social justice for all Indonesian people. This article aims to find out the national defense strategies that can be carried out to increase national resilience in the era of globalization. This research uses a qualitative approach through the literature study method. The main source of this research data is the research article published through google scholar. Data analysis is carried out qualitatively with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the dynamic implementation of Pancasila values in the life of society, nation, and state so that Pancasila remains relevant in its function as a guideline for decision-making and problem-solving in the life of the nation and state, and so that the loyalty of citizens and citizens to Pancasila is maintained. In the era of globalization, the strategy of defending the country is very important to increase national resilience. Therefore, governments, communities, and non-governmental organizations must work together to create effective national defense strategies to ensure national security and resilience and increase public awareness of the importance of national defense to enhance national resilience

Keywords: Defending the Country, National Resilience, Globalization Era

Abstrak. Pancasila sering dilihat sebagai ideologi yang berhadapan dengan ideologi global, seperti kapitalisme dan liberalisme. Pancasila yang dibangun adalah untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui strategi bela negara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Sumber utama data penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasi melalui *google scholar*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap terjaga. Di era globalisasi, strategi bela negara sangat penting untuk meningkatkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk membuat strategi bela negara yang efektif untuk memastikan keamanan dan ketahanan nasional serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara untuk meningkatkan ketahanan nasional

Kata Kunci: Bela Negara, Ketahanan Nasional, Era Globalisasi

How to Cite: Eka., Kurniati., Faujiah, Z., & Nurhasanah. (2024). Strategi Bela Negara untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional di Era Globalisasi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (3), 3061-3067. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1204>

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan era perubahan- perubahan yang cepat yang mengandung hal-hal yang positif, namun juga membawa segi-segi negatif bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus pandai-pandai menangkap dan memanfaatkan peluang dari segi-segi positifnya dan tetap berdiripada nilai-nilai yang telah diikrarkan, dibela, dan dijunjung tinggi (Akbar et al., 2024). Menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia harus dapat tegak dengan memiliki kedaulatan di bidang politik, kemandirian bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan memiliki daya lenting yang kuat dalam ketahanan nasional. Lebih dari itu, harus tetap memperkokoh jati diri sebagai Pancasila yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara (Ngatourrohman et al., 2024). Untuk mempertahankan negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap warga negaranya.

Jika warga negara bersifat aktif dan peduli terhadap kemajuan bangsanya maka kelangsungan hidup bangsa akan tetap terpelihara. Sebaliknya jika warga negara tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya kelangsungan hidup bangsa akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar. Multikulturalisme adalah sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang beragam dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui sosial-budaya mereka yang berbeda, dan mendorong dan memungkinkan kontribusi melanjutkan mereka dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan semua dalam organisasi atau masyarakat (Rizky Hikmawan, 2017). Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas (Sleeter and Grant, 1988).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Penelitian didasarkan pada analisis terhadap informasi yang ditemukan dalam literatur, dokumen, atau sumber lainnya yang dapat dianggap obyektif, yaitu tidak terpengaruh oleh sudut pandang atau bias tertentu. Sumber utama data penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasi melalui *google scholar*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Pada dasarnya semua bangsa di dunia, memiliki latar belakang sejarah, budaya dan peradaban yang dijiwai oleh sistem nilai dan filsafat, baik nilai-nilai moral keagamaan (theisme-religious) maupun nilai non religious (sekular, atheisme). Tegasnya, setiap bangsa senantiasa menegakkan nilai-nilai peradabannya dengan dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai-nilai religious atau non-religious. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur, kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwarnai oleh adanya keyakinan agama dan kepercayaan yang kuat. Disisi lain aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi juga mewarnai kehidupan ketanegaraan suatu bangsa. Keberadaan peninggalan candi seperti candi borobudur, prambanan, dan situs peninggalan keagamaan lainnya merupakan bukti tentang.

Hal ini menunjukkan adanya pedoman hidup dasar bangsa Indonesia yang berke-Tuhanan. Selanjutnya, prinsip yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, merupakan bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia sejak dulu telah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang beragam. Dalam budaya bangsa, manusia senantiasa ditempatkan dan diperlakukan sesuai dengan kodrat sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Manoppo et al., 2021). Hal ini dapat dilihat dari berbagai seni budaya bangsa yang mengagungkan manusia sesuai dengan kultur dan budaya yang beragam. Sementara itu, menyadari keragaman dan pluralitas yang dimiliki bangsa dan belajar dari pengalaman masa penjajahan, maka persatuan bangsa Indonesia menjadi tuntunan hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Justru dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen (Indrawan & Efriza, 2018). Prinsip persatuan Indonesia bukan berarti menghilangkan eksistensi, ciri dan identitas masing-masing suku bangsa. Eksistensi, ciri dan identitas masing-masing suku bangsa tetap terpelihara dan terjaga keberadaannya. Sila keempat merupakan bentuk kesadaran dan pengejawantahan prinsip-prinsip kehidupan kelembagaan yang didasarkan pada perilaku kehidupan gotong-royong yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Sifat kegotongroyongan dan musyawarah mufakat telah menjadi pilar kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat secara turun temurun (Azzaria, 2021).

Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban serta Menyokong Indonesia merupakan tanggung jawab serta hak setiap orang yang tinggal di dalamnya. Pernyataan ini diatur secara rinci dalam Pasal 27 Ayat 3 dari Konstitusi Indonesia yang telah mengalami dua kali perubahan, yang menyatakan bahwa "setiap orang warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara". Sama halnya dengan Setiap warga

negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30 UUD 1945, perubahan kedua, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan negaranya. "Setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara," kata ayat 3 Pasal 27 UUD 1945 perubahan kedua. Ini berarti bahwa Sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, setiap warga negara berhak dan wajib mengambil bagian dalam menentukan kebijakan yang akan melindungi negara melalui lembaga perwakilan.

Selain itu, setiap warga negara harus berpartisipasi dalam setiap upaya untuk mempertahankan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Sampai saat ini, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah undang-undang yang melaksanakan Pasal 30 UUD 1945. Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara; (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran yang wajib, dan pengabdian sukarela atau wajib sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan d. Pengabdian sesuai dengan profesi. (3) Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur oleh undang-undang. Tidak diragukan lagi, partisipasi warga negara dalam memerangi ancaman disertai dengan upaya bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Bela Negara secara Fisik yaitu warga negara dapat berpartisipasi dalam bela negara secara fisik dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Indonesia dan Pelatihan Kemiliteran Dasar Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara mengamatkan konsep Rakyat Terlatih., tetapi saat ini program Rakyat Terlatih menawarkan pelatihan dasar kemiliteran. Latihan ini terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah menerima pendidikan dasar militer Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat adalah empat fungsi rakyat terlatih. Tiga fungsi

pertama biasanya dilakukan selama masa damai atau saat unsur-unsur rakyat terlibat dalam bencana alam atau darurat sipil.

Orang-orang terlatih membantu pemerintah daerah menjaga keamanan dan ketertiban, sementara Perlawanan Rakyat digunakan dalam situasi darurat perang berfungsi sebagai bagian dari pasukan reguler TNI dan terlibat langsung dalam pertempuran. Tugas dapat ditempatkan disesuaikan dengan pendidikan atau pekerjaan mereka di dunia sipil, seperti dokter di Rumah Sakit Militer, pengacara di Departemen Hukum, akuntan di Bagian Keuangan, penerbang di Skadron Angkatan, dan sebagainya. Gagasan tidak dimaksudkan untuk militerisasi masyarakat sipil, tetapi untuk memperkenalkan "dwifungsi sipil" dan menyebarkan "konsep bela negara", yang berarti bahwa pertahanan keamanan negara adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia, bukan hanya TNI (Hikmawan, 2017)

Bela Negara nonfisik yaitu bela negara tidak selalu berarti militer atau "memangkul senjata menghadapi musuh.". Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi dapat memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam bela negara secara nonfisik. pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan ini dapat diberikan secara formal atau non-formal. Oleh karena itu, warga negara dapat berpartisipasi dalam bela negara secara non fisik dalam berbagai bentuk dan dalam segala situasi, seperti: (a) mendapatkan pendidikan kewarganegaraan secara formal dan nonformal; dan (b) berpartisipasi secara aktif dalam memerangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, dengan menjadi sukarelawan bencana banjir. (c) Membayar pajak dan retribusi yang membantu pengeluaran pembangunan negara. Sekarang ini, membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara adalah bentuk bela negara non-fisik dari warga negara, terutama dalam hal ketahanan ekonomi nasional (Andrianto et al., 2023).

Saat ini tidak sedikit generasi muda Indonesia yang telah melupakan identitas bangsanya yang berdampak pada krisis identitas nasional. Maka kiranya sudah sangat mendesak bagaimana mempertahankan identitas nasional kepada para generasi muda sebagai warga negara yang dapat diandalkan bagi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu, generasi muda perlu menambah wawasan dan melestarikan budaya Indonesia, upaya ini dapat dilakukan supaya generasi muda selalu ingat dengan identitas nasionalnya (Sunara Akbar et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hambatan dalam mempertahankan identitas nasional pada generasi muda, faktor pendukung dalam mempertahankan identitas nasional generasi muda, dan upaya mempertahankan identitas nasional di era globalisasi.

Seperti yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 30 UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mereka juga wajib berpartisipasi dalam upaya ketahanan ekonomi, yang berarti mereka harus membayar pajak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Dengan sumber penghasilan Pajak membantu negara menjaga stabilitas dan memenuhi kewajibannya terhadap hak warga negara. Salah satu contoh adalah pengendalian inflasi, yang merupakan peningkatan harga yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar, yang menyebabkan pemerintah menaikkan tarif pajak untuk mencegah inflasi naik (Soepandji & Farid, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap terjaga. Pancasila adalah upaya pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran dan kemudian menegukannya sebagai suatu kewajiban yang selaras dengan ruang dan waktu. Di era globalisasi, strategi bela negara sangat penting untuk meningkatkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk membuat strategi bela negara yang efektif untuk memastikan keamanan dan ketahanan nasional serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara untuk meningkatkan ketahanan nasional.

REFERENSI

- Alex Suseno, 2000 Strategi Pembudayaan Kesadaran Hak Bela Negara Tahun 2000-2004, Jakarta, Banks, J.A. 1993. "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice" In Review of Research in Education, vol. 19, edited by L. Darling-Hammond. Washington, D.C.: American Educational Research Association.
- Andrianto, M. A., Gunawan, M. F., Nugraha, D. S., Gifanus, M. F., & Nurhadi, M. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Komunitas Mobile Legends. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8(1), 58–62. <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.64046>
- Azzaria, S. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 57–74. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1925>
- Framadinta, Satyra "Inpoetidumen Nak Na Ja selama quoro-2013, diakses pada 16 Oktober 2017
- Fosenbom, Chubalists and Nationalism Why Inter Drresten, Sovereignty Fortiga Parengustfaics.com 2017-07-30 pada 11 Oktober 2019

- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>
- Kartal 2017 Berpotensi Melemen dalam http://ektos.c 2017/07/23/17 masyarakat pada Buatal 2017 berpotensi airman, takes patta Oktober 201Manoppo, R. T. S., Pati, A. ., & Kimbal, A. . (2021). Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309 / Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 17(1), 103. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32486>
- Mallket, Jettsande, I hoper Barne Hingga 15% 1,53 Miliardan" The Finarice, dalam titty thuanse dettkimper-burang-kuivuma hingga 1000 miharham, dasas pada 12 GamberNadlir, Mah. KemumMasyarakut pads
- Ngatourrohman, A., Fitria, J., Nisa, K., & Shobrina, N. (2024). *Menguatkan Ketahanan Nasional Bangsa Dengan Upaya Bela Negara*.
- Rizky Hikmawan, S. S., Adi Rio Arianto,. (2017). Pemikiran Bela Negara Dan Hubungan Internasional: Pergeseran Peran Negara Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sudut Pandang Studi Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.234>
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Sunara Akbar, R., Iskandar, T., Prasetyo, M. A., Damayanti, T. O., Khomaidi, M. I., Abadi, M. D., Bachtiar C.R, S., & Renhard, R. (2024). Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital. *Journal on Education*, 6(4), 18838–18849. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5867>